

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM (TPU) MUSLIM DI KOTA PONTIANAK

Dewi Ria Indriana

Abstrak

Masyarakat sebagai bagian dari sebuah kota harus menyadari bahwa suatu saat mereka akan meninggal dunia dan perlu sedini mungkin memikirkan rencana tempat pemakaman baginyawalaupun ukuran petak makam dan kijing tidak mengikuti standar aturan-aturan penataan TPU. Hal ini disebabkan buruknya pengelolaan/kepengurusan pemakaman dan kurangnya perhatian dan peran aktif dari pemerintah. Pada penelitian ini lingkup lokasi yang dipilih adalah TPU Muslim Al-Ikhlas Sungai Bangkong dan TPU Muslim Danau Sentarum Kecamatan Pontianak Kota. Dengan menggunakan teknik accidental sampling yaitu mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan dan pemilihan responden dilakukan dengan cara purposive sampling atau pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan responden adalah pemerintah, swasta dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di kedua TPU ini mengalami tekanan terhadap kapasitas atau daya tampung. Sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian penuh dan ikut berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan TPU Muslim di Kota Pontianak. Untuk mengatasi ketersediaan lahan pemakaman, memberikan solusi kepada pemerintah dengan cara membuka lahan baru dipinggir kota dan menata ulang TPU Muslim yang telah ada. Kedua hal tersebut diterapkan dengan sistem pemakaman tumpuk model tumpang. Dengan sempitnya lahan, memberikan wacana bagi ahli waris untuk menjadikan satu dengan jenazah keluarga yang terlebih dahulu dimakamkan. Makam boleh dijadikan tumpangan pada jenazah yang telah dikubur tiga tahun atau makam yang tidak dirawat oleh ahli warisnya selama tiga tahun.

Kata-kata kunci : ketersediaan lahan, makam tumpang, pengelolaan, pengembangan, TPU muslim Pontianak

1. PENDAHULUAN

Dalam peraturan hukum di Indonesia, tempat pemakaman diatur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Departemen Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Adanya kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah telah memberikan suatu

pelayanan terhadap masyarakat dengan menyediakan lahan untuk areal pemakaman.

Di Kota Pontianak, lahan pemakaman yang tersedia merupakan wakaf dari masyarakat yang tinggal di dekat area pemakaman. Selama ini peran masyarakat di Kota Pontianak dirasakan cenderung belum optimal. Hal ini karena kebanyakan mereka beranggapan bahwa masalah pengelolaan/ketertiban lahan pemakaman merupakan tanggung jawab pemerintah setempat dan merasa tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Padahal dalam 6

tahun terakhir ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pontianak telah menyerahkan masalah pemakaman ke masing-masing yayasan Pemakaman. Kendala yang dirasakan oleh masing-masing Yayasan Pemakaman adalah semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk pemakaman. Berbicara mengenai persoalan lahan pemakaman di Kota Pontianak yang semakin tergusur dengan pembangunan berbagai proyek-proyek besar dan di lain pihak lahan pemakaman akan habis suatu saat karena perbandingan antara penyediaan lahan baru dan petak makam untuk jenazah yang tidak seimbang. Permasalahan lain juga ditemukan tentang rencana perluasan area pemakaman selalu terhambat oleh rumitnya upaya pembebasan lahan. Kondisi ini terjadi karena masyarakat lebih merelakan tanahnya yang berada di sekitar pemakaman untuk dijual kepada yayasan pemakaman dengan harga yang tinggi dan terkadang mereka lebih memilih untuk menjual kepada developer - developer untuk dibangun perumahan dan ruko.

Pemakaman merupakan sebuah Ruang Terbuka Hijau yang memberikan banyak keuntungan terutama bagi lingkungan sekitar tempat pemakaman tersebut berada. Jika melihat kondisi RTH pemakaman yang terdapat pada daerah di Kota Pontianak, maka kita akan melihat bahwa sebagian besar pemakaman tersebut kurang memiliki nilai estetika. Pada kenyataannya, pemakaman yang terdapat di daerah urban mempunyai fungsi khusus sebagai salah satu areal hijau dan resapan air dan dapat

membantu mengurangi permasalahan seperti polusi udara yang dikeluarkan dari padatnya kendaraan bermotor di jalan raya dan bahaya banjir. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan Tempat Pemakaman Umum di Kota Pontianak dan selanjutnya membuat arahan konsep pengelolaan dan pengembangan. Diharapkan dapat membuat TPU di Kota Pontianak menjadi bagian dari RTH pemakaman yang memiliki nilai estetika tinggi dan dapat dikembangkan untuk menaikkan kualitas pemakaman di Kota Pontianak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 **Tempat Pemakaman Umum** biasa disingkat TPU merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkannya. TPU ini berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam penggunaan lahan TPU untuk makam dikelompokkan berdasarkan agama yang dianut oleh orang yang meninggal tersebut. Kemudian, ukuran tanah untuk makam disediakan maksimal 2,50 x 1,50 m dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1,50 m dari permukaan tanah.

Berkaitan dengan konsep pengelolaan pemakaman, maka George R. Terry (2001) mengemukakan bahwa manajemen mencakup empat fungsi dasar, yang sering disingkat menjadi POAC, yaitu:

1. *Planning* (pengelolaan berkaitan dengan kegiatan/fungsi merencanakan)
2. *Organizing* (mengorganisasikan sumber daya yang ada)
3. *Actuating* (menggerakkan program kerja)
4. *Controlling* (mengendalikan jalannya pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan).

Menurut Hutaauruk (2003), komponen penataan kawasan TPU terdiri dari petak makam, elemen vegetasi, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan dan tempat parkir, plaza dan ruang terbuka, gedung pengelola TPU, elemen penanda, lampu penerangan, tempat duduk, gerbang, pagar, dan jaringan utilitas. Setiap komponen harus ditata sesuai dengan variabel penataan yang ada pada komponen tersebut seperti luas, bentuk, ukuran, jarak, letak, material permukaan dan lain-lain. Hal ini perlu diperhatikan karena dengan fasilitas yang baik maka TPU dapat optimal sebagai salah satu elemen sarana ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan selain untuk kepentingan pemakaman (sosial), tetapi juga untuk tempat rekreasi agar menghilangkan kesan mistis yang selama ini masyarakat rasakan.

3. METODE PENELITIAN

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini berupa data primer dan Sekunder.

3.1 Metode Pengumpulan Data

Diperoleh dari survey lokasi penelitian seperti mengidentifikasi kondisi pemakaman umum di lokasi penelitian, penyebaran kuesioner, dan wawancara semi terstruktur.

Wawancara menggunakan teknik *accidental sampling* berdasarkan nara sumber yang ditemui di lokasi penelitian. menurut Sugiyono (2004:77) . Adapun informan-informan kunci yang diambil adalah:

Pemilihan responden dilakukan dengan cara *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan pertimbangan responden adalah aktor atau pengguna lahan (*stakeholders*)

3.2 Metode Pengolahan Data

Penelitian ini termasuk ke dalam *Penelitian Kualitatif* yaitu penelitian yang dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif (Satori, 2009)..

Dengan melakukan identifikasi kondisi eksisting dan permasalahan-permasalahan tentang pemakaman terlebih dahulu sehingga dapat diketahui fakta-fakta baru atau temuan penting yang dapat dijadikan bahan untuk evaluasi penyediaan tempat pemakaman umum (TPU) di Kota Pontianak.

3.3 Metode Analisis

Metode yang di gunakan dalam analisis ini meliputi analisis deskriptif dan kuantitatif, dimana hal ini digunakan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang tempat pemakaman umum (TPU). Adapun beberapa faktor penting dan sangat erat kaitannya yang perlu dianalisis adalah:

1. Analisis pemecahan masalah
2. Analisis ketersediaan lahan
3. Analisa penataan pemakaman

4. Perhitungan Kebutuhan Luas Pemakaman TPU Muslim Al-Ikhlas Sungai Bangkong dan Danau Sentarum,
5. Perumusan Konsep pengelolaan dan pengembangan pemakaman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Identifikasi karakteristik & pemetaan kondisi pengelolaan.

Dalam mengidentifikasi TPU Muslim ini, mengacu pada Tarigan (2008) dilakukan pengelompokan menjadi beberapa komponen yang menjadi perhatian utama pada penelitian ini untuk mendapatkan karakteristik masing-masing kasus, yaitu:

Administrasi pengelolaan

- TPU Muslim Al-Ikhlas Sungai Bangkong : Ketua RT sbg pengurus ditunjuk oleh Lurah yg bertugas mendata jenazah yang dikuburkan, tdk memiliki retribusi, biaya administrasi pemakaman ditentukan oleh penggali kubur.
- TPU Muslim Danau Sentarum : secara administrasi sudah baik, proses administrasi dilakukan oleh pengelola selanjutnya menunjuk petugas penggali kubur untuk membuat lubang makam yang baru

Sosial, budaya, masyarakat

TPU Muslim Al-Ikhlas Sungai Bangkong:

- Menyediakan lapangan kerja baru
- Tdk memiliki ritual khusus pada pemakaman
- Memberikan dampak kemacetan pada saat pemakaman jenazah
- Wadah masyarakat untuk berziarah serta masyarakat berkumpul

TPU Muslim Danau Sentarum :Menyediakan lapangan kerja baru

seperti penjual minuman segar dan pembuatan kijing.

4.2 Ketersediaan lahan

Kondisi Ketersediaan Lahan Pemakaman di Kecamatan Pontianak Kota dengan melakukan kompilasi data jumlah angka kematian dan lahan pemakaman yang tersedia di seluruh wilayah kelurahan - kelurahan memperlihatkan kondisi yang tidak seimbang antara jumlah angka kematian dan kebutuhan lahan pemakaman yang tersedia. Data yang diperoleh bahwa kondisi pemakaman tidak menggunakan standarisasi ukuran petak makam yang sesuai dengan Permen PU maka dengan asumsi ukuran makam yang lazim digunakan sebesar 0.7-1m x 1.8-2m maka didapat hasil luas makam yang sudah digunakan sebesar 42.866 m² dan yang tersisa sebesar 14.063 m² kompilasi data keseluruhan diketahui hasil bahwa luas TPU Muslim yang ada di Kecamatan Pontianak Kota sebesar 56.929 m² menyisakan ketersediaan lahan sebesar 14.063 m² atau 24.70 %. Dari rata-rata angka kematian sebanyak 434 orang /tahun di Kecamatan Pontianak Kota masih memiliki ketersediaan lahan untuk 18,5 tahun kedepan apabila adanya sistem rayonisasi. Tetapi hal ini sangat susah diterapkan karena TPU Muslim yang ada di Kecamatan Pontianak Kota masih sangat diminati oleh warga di Kota Pontianak karena lokasi yang strategis dan mudah diakses serta dekat dengan anggota keluarga ahli warisnya. Jika tidak diterapkan rayonisasi seperti pada saat sekarang ini ketersediaan lahan di Kecamatan Pontianak Kota kurang dari 18,5 tahun. Hal ini sesuai dengan data

dilapangan bahwa pada TPU Al-ikhlas Sungai Bangkong, TPU Danau Sentarum banyak warga yang dimakamkan berasal dari warga diluar Kecamatan Pontianak Kota.

Kedua TPU ini memiliki aksesibilitas yang sangat baik karena berbatasan langsung dengan Kecamatan Pontianak Selatan dan berada di jalan utama. Dari perbandingan kondisi pemakaman di dua lokasi TPU Muslim yakni TPU Muslim Sungai Bangkong & TPU Muslim danau Sentarum mengalami tekanan terhadap ketersediaan lahan & daya tampung pemakaman. Karena Kedua TPU ini sangat diminati masyarakat di Kelurahan Sungai Bangkong maupun diluar Kelurahan ini bahkan masyarakat diluar Kecamatan Pontianak Kota, Jumlah jenazah pada dua TPU Muslim > angka kematian sekecamatan Pontianak Kota

4.3 Sudut pandang sosial budaya

Melihat analisis ketersediaan lahan diatas, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian penuh dan ikut berperan aktif dalam pengelolaan dan pengembangan TPU Muslim di Kota Pontianak. Untuk mengatasi ketersediaan lahan pemakaman, pemerintah dapat membuka lahan baru dipinggir kota dan menata ulang TPU Muslim yang telah ada di Kota Pontianak.

Kedua hal tersebut diterapkan dengan sistem pemakaman tumpuk dengan model pemakaman tumpang. Model ini sangat cocok diterapkan pada TPU Muslim di Kota Pontianak. Dengan sempitnya lahan, memberikan wacana bagi ahli waris untuk menjadikan satu dengan jenazah keluarga yang terlebih dahulu dimakamkan., makam boleh

dijadikan tumpangan pada jenazah yang telah dikubur tiga tahun atau makam yang tidak dirawat oleh ahli warisnya selama 3 tahun. Periode tiga tahun diambil dengan alasan :

- Adat istiadat warga muslim di Kota Pontianak bahwa makam telah kering dan tidak berbau setelah 1.000 hari atau tiga tahun, roh tidak akan kembali lagi kerumah betul-betul meninggalkan keluarganya. Prosesi ini ditandai dengan kegiatan *beruah* yang dilaksanakan mulai 1-7 hari, 14 hari, 40 hari, 100 hari dan diakhir hingga hari ke 1000 setelah kematian.
- Menurut Syariat Islam, jenazah diperbolehkan ditumpang oleh dua orang atau lebih setelah jenazah yang dimakamkan sebelumnya telah menjadi tulang belulang.
- Menurut ilmu kedokteran, proses pembusukan mayat hingga menjadi tulang belulang memerlukan proses lebih dari satu tahun

Oleh karena itu, dari ketiga aspek yang dinilai tidak ditemukan pertentangan jika dilakukan penguburan jenazah di satu lubang setelah 3 tahun sejak kematian jenazah pertama. Dan berdasarkan hukum agama disebutkan bahwa mencampurkan jenazah / *mayyit* baru dengan yang sudah hancur (tulang-tulanganya) dalam satu tempat kuburan, baik antara sesama muslim atau dengan non-Muslim boleh hukumnya dengan syarat harus seagama dan sama jenis kelaminnya.

Melihat semakin terbatasnya lahan pemakaman terutama diperkotaan, sudah saatnya pemerintah membuka lahan pemakaman baru dipinggir kota sesuai

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013 – 2033. Apabila system pemakaman ini benar-benar diterapkan di Kota Pontianak, maka keterbatasan ketersediaan lahan pemakaman dapat teratasi. Karena sistem pemakaman tumpang dapat memakamkan dua jenazah atau lebih dalam satu lubang secara berulang dalam kurun waktu tiga tahun. Jadi tidak ada batasan maksimal pemakaman penuh.

4.4 Pengelolaan Pemakaman

Pengelolaan berkaitan dengan kegiatan/fungsi merencanakan (*planning*), mengorganisasikan sumber daya yang ada (*organizing*), menggerakkan program kerja (*actuating*), dan mengendalikan jalannya pekerjaan (*controlling*), dalam rangka pencapaian tujuan.

Ñ Perencanaan (*Planning*)

Dalam hal ini berkaitan dengan tempat pemakaman, Badan Wakaf merencanakan pengadaan lahan dilokasi pinggir kota yang disesuaikan dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktupelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan nilai tanah. setelah mendapatkan pengadaan lahan, maka pihak yayasan yang ditunjuk oleh Badan Wakaf selaku pelaksana pemakaman mendata anggota keluarga yang keluarganya dimakamkan di TPU muslim ini untuk menarik retribusi pemeliharaan pemakaman setiap bulannya.

Ñ Pengorganisasian (*Organizing*)

Dalam pengorganisasian, Badan Wakaf menunjuk pihak yayasan sebagai pelaksana dalam pengelolaan pemakaman. Dimana penunjukkan tersebut berdasarkan peraturan daerah dan yayasan tersebut jelas dasar hukumnya. Selanjutnya struktur organisasi yayasan dibuat oleh internal yayasan tersebut. Pengorganisasian retribusi dibuat dan ditetapkan nilainya oleh Pengurus Yayasan bersama pembina. Selanjutnya disetujui dan disahkan oleh Badan Wakaf. Pihak yayasan sebagai pelaksana memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan pemakaman di lapangan termasuk didalamnya pungutan retribusi biaya pemakaman dan biaya-biaya yang lain. Yayasan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya kepada Badan Wakaf. Penulis memberikan usulan bahwa yayasan pengelola TPU Muslim didirikan dan berada dibawah naungan Badan Wakaf. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Misi BWI yaitu menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Badan Wakaf sebagai institusi pengelola wakaf yang memiliki jaringan sampai di provinsi dan kabupaten kota, secara undang-undang dan keorganisasian sudah sangat baik dan

professional. Dalam struktur organisasi yayasan TPU Muslim memiliki Pembina dan pengawas.

Disini Pembina merupakan pendiri yayasan yang tidak diberi gaji atau tunjangan oleh pihak Yayasan. Pembina juga memiliki masa jabatan yang tidak ditentukan lamanya dan tidak boleh merangkap menjadi anggota Pengurus.

Selain Pembina, yayasan juga memiliki pengawas yang ditunjuk langsung oleh Pembina untuk bekerja secara sukarela dan tidak menerima gaji.

Dalam konsep ini penulis memberikan usulan para anggota/pengurus yayasan juga berasal dari warga masyarakat sekitar TPU, seperti pengurus RT, RW, pengurus masjid dan tokoh masyarakat setempat. Peran masyarakat penulis libatkan agar pengelolaan yayasan dapat berjalan dengan maksimal dan didukung sepenuhnya oleh warga masyarakat. Diharapkan masing-masing pengurus mampu menjalankan peran, fungsi dan tugasnya masing-masing dengan jelas dan baik.

- **Penggerakan (*Actuating*)**

Dalam hal ini pelaksanaan yang dimaksud pada pemakaman adalah Badan Wakaf sebagai pengelola dalam pengadaan lahan harus mempertimbangkan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Serta penggantian ganti rugi kepada pihak yang sudah menjual tanahnya kepada Badan Wakaf dimana bersama pemerintah dengan wewenangnya membeli harga tanah yang sesuai dengan kemampuan keuangan Badan Wakaf. Sedangkan peran yayasan selaku

pengurus/pengelola pemakaman untuk menarik retribusi pemeliharaan pemakaman kepada setiap anggota keluarga yang keluarganya dimakamkan di areal TPU Muslim masing-masing dan mencari sumber-sumber dana lain diluar retribusi seperti biaya fardhu kifayah, ambulance, dokumentasi, penyewaan tenda, sumbangan dari para donatur dan pihak swasta dalam program CSR. Dalam usulan konsep pengelolaan TPU Muslim ini, penulis menyediakan fasilitas-fasilitas tambahan seperti pelaksanaan fardhu kifayah, ambulance, dokumentasi dan penyewaan tenda. Biaya-biaya fasilitas tambahan tersebut telah ditentukan dan ditetapkan nilainya oleh yayasan. Pendapatan dari fasilitas tersebut diharapkan selain dapat menutup biaya operasional tapi juga mampu memberikan insentif kepada pengurus yayasan dengan harapan para pengurus dapat bekerja dengan maksimal. Dalam pelaksanaan kegiatan pendataan menjadi tanggung jawab yayasan, agar dapat memprediksikan ketersediaan lahan pemakaman yang dibutuhkan dalam jangka waktu periode tertentu. Dengan menggunakan pemakaman system tumpuk dengan model pemakaman tumpang setiap satu kepala keluarga dikenakan biaya administrasi awal untuk menjadi anggota baru agar dapat dimakamkan pada TPU Muslim tersebut sebesar Rp. 1.500.000 dimana biaya tersebut dipungut pada saat pendataan yang dilakukan oleh yayasan. Biaya tersebut dapat juga dibayar secara angsuran untuk meringankan warga masyarakat.

Selain biaya menjadi anggota baru, masyarakat juga dikenakan biaya-biaya seperti :

- a. Fardhu kifayah sebesar Rp. 1.000.000
- b. Biaya penggalian kubur sebesar Rp. 250.000
- c. Biaya sewa ambulance sebesar Rp. 250.000
- d. Biaya retribusi kebersihan Rp. 120.000 per tahun untuk setiap 1 orang yang meninggal dunia.

Selain itu yayasan juga menyiapkan fasilitas seperti dokumentasi sebesar Rp. 500.000 dan penyewaan tenda & kursi sebesar Rp. 500.000. Biaya pesan tempat pada saat administrasi awal sebesar Rp. 1.500.000 tersebut diperuntukkan untuk satu petak makam yang dapat digunakan oleh satu keluarga dalam periode pengulangan pemakaman selama tiga tahun. Makam yang tidak pernah dikunjungi oleh ahli warisnya dan tidak membayar uang retribusi selama 3 tahun berturut-turut maka petak makamnya dapat digunakan untuk jenazah dari keluarga lain. Bagi orang lain yang ingin dimakamkan di petak makam yang tidak memiliki ikatan keluarga dapat dimakamkan dengan izin tertulis terlebih dahulu. Dalam pelaksanaan kegiatan pemakaman masyarakat diharapkan juga terlibat dalam kegiatan gotong royong atau kerja bakti membersihkan lokasi disekitar makam tiap satu bulan sekali.

Ñ Pengawasan (*Controlling*)

Dalam tahapan pengawasan ini, kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh yayasan diawasi oleh pengawas yang berasal dari internal maupun eksternal yayasan. Pengawasan Internal dilakukan oleh

Badan Pengawas sedangkan Pengawasan Eksternal dilakukan oleh Badan Wakaf sebagai naungan tertinggi yayasan, pemerintah dan masyarakat serta pihak yang peduli terhadap pengelolaan pemakaman muslim ini. Data hasil pengawasan kemudian dievaluasi apakah terjadi indikasi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf. Apabila ada indikasi pelanggaran maka dilakukan kegiatan pengawasan, yaitu dengan verifikasi. Hasil verifikasi dituangkan dalam pelaporan sebagai bahan rumusan tindakan penertiban yang diperlukan. Tindakan penertiban diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam penegakan hukum dan petugas ketertiban.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi pengelolaan di Kota Pontianak belum terkelola dengan baik disebabkan sebagian besar TPU Muslim belum memiliki kelembagaan/yayasan yang jelas badan hukumnya dan minimnya peran pemerintah.
2. TPU Muslim kedepannya memerlukan desain khusus dalam penataan pemakaman. Ada beberapa komponen yang memiliki kriteria yang harus diperhatikan dalam penataan ini. Seperti petak makam dengan standar ukuran 1 x 2 meter dengan jarak antar makam 0.5 meter serta kedalaman galian makam 1.5

meter, standarisasi kijing yang tidak permanen dan didesain hanya menggunakan hamparan rumput diatasnya, elemen vegetasi, pedestrian, tempat parkir dan kantor pengelola.

3. Dalam pengelolaan dan pengembangan pemakaman di Kota Pontianak Badan Wakaf memiliki potensi dan peran yang lebih besar. Badan Wakaf bersama pemerintah daerah dengan wewenangnya harus lebih berperan aktif dalam pengelolaannya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan sampai ke pengawasan. Sementara pihak yayasan ditunjuk oleh Badan Wakaf yang memiliki badan hukum yang jelas berperan sebagai pelaksana dilapangan.
4. Yang menjadi arahan konsep penulis untuk pengelolaan TPU Muslim kedepannya yaitu :**Tahap Perencanaan (Planning), Tahap Pengorganisasian (Organizing), Tahap Penggerakan (Actuating), Tahap Pengawasan (Controlling)**

Adapun yang menjadi arahan konsep pengembangan TPU Muslim kedepannya yaitu :

- Pemerintah dapat menyediakan lahan pemakaman baru dipinggir kota
- Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Yayasan dan disahkan oleh Badan Wakaf didukung sepenuhnya oleh Pemerintah
- Badan Wakaf dibantu oleh dinas terkait untuk mengadakan pelatihan - pelatihan kepada pengurus yayasan agar memiliki SDM yang lebih

berkualitas dan professional dalam pengelolaan pemakaman

- Badan Wakaf dibantu Pemerintah untuk melakukan pendekatan personal kepada masyarakat didampingi oleh tokoh masyarakat dan Badan Wakaf menata pemakaman yang dapat menghilangkan kesan angker dan seram.
- Badan Wakaf sebagai naungan tertinggi dalam pengelolaan pemakaman dapat merangkul masyarakat bersama-sama untuk ikut terlibat dalam kegiatan pemeliharaan pemakaman dan pengawasan kegiatan pemakaman.
- Masyarakat diharapkan ikut membantu Badan Wakaf dalam mengatasi keterbatasan lahan pemakaman dengan cara membantu mensosialisasikan penggunaan lahan pemakaman system tumpuk model tumpang dimana system ini tergantung pada izin ahli waris.
- Masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan dalam pengelolaan pemakaman.
- Yayasan berperan aktif dalam sosialisasi system pemakaman tumpuk model tumpang di masyarakat.

6. Daftar Pustaka

Hutauruk, Tona. (2003). *Prinsip-Prinsip Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang Dapat Digunakan Sebagai Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta*. Bandung: Tugas Akhir Jurusan Teknik Planologi ITB.

Kementerian Dalam Negeri. (1989). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sekretariat Daerah Kota Pontianak. (2010). *Peraturan Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 tentang RTRW Kota Pontianak Tahun 2013 – 2033 Paragraf 5 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 32 ayat 1 dan 2*. Pontianak: Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta

Tarigan, Ronald Rezeki. (2008). *Kajian Aspek Ekonomi pada Pengelolaan Tanah Pemakaman Umum (Taman Pemakaman Umum) Kristen di Kota Medan, Tesis Magister*. Medan: Program S2 Universitas Sumatera Utara.

Terry, George R. (2003). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.